



Pangkas Anggaran untuk Kesejahteraan

ADANYA PHK besar-besaran kali ini, turut direspon wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai. Ia mengatakan, opsi kedua untuk kesejahteraan perlu dilakukan oleh Pemda DIY. Untuk saat ini, Pemda DIY sudah memangkas APBD 2020.

Berkas kesepakatan itu pun sudah di-

irim ke Pemerintah pusat. Ia melanjutkan, sejumlah dana yang dipotong antara lain dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) sebesar 10 persen.

Begitu juga dengan anggaran bagi hasil pendapatan untuk daerah juga akan dipotong hingga mencapai 25 persen.

"Total semuanya mencapai Rp250 triliun hingga Rp350 triliun. Nantinya itu akan digunakan untuk menutupi kebutuhan masyarakat di DIY, mulai dari kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain, selama masa pandemi," katanya.

● ke halaman 15

Pangkas Anggaran

● Sambungan Hal 9

Masih kata Anton, anggaran tersebut sudah termasuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. "Tidak hanya berlaku yang di PHK saja. Tapi semua masyarakat, termasuk tenaga medis," imbuhnya.

Politisi partai Gerindra itu menyebut, Jumat (10/4) depan, Gubernur beserta kepala daerah di lima Kabupaten/Kota akan kembali membahas skema pembiayaan jika draf redesign APBD tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.

"Betul, Jumat nanti ada pertemuan Gubernur dengan para kepala daerah untuk membahas lebih lanjut. Sementara terkait subsidi bagi karyawan

yang terkena PHK, saya tegas untuk Dinsos dan Disnakertrans supaya berkoordinasi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lusi Ningsih mengatakan Kartu Pra Kerja berkaitan dengan program pengembangan kompetensi kerja. Kartu tersebut ditujukan pencari kerja, pekerja terPHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Yogyakarta. Pihaknya telah melakukan persiapan di LPK sejak lama, termasuk akreditasi LPK.

"Kita lakukan pendampingan di LPK, menjelaskan nanti tata caranya, kemudian sistem pen-

daftaran, pelatihannya juga. Termasuk kita siapkan juga akreditasinya. Dari sekitar 38 LPK hanya ada sekitar 20 yang akhirnya bisa memberikan pelatihan," katanya.

Ia melanjutkan dalam program Kartu Pra Kerja yang diutamakan adalah kesadaran dari masyarakat. Pihaknya tidak memiliki kategori khusus yang diprioritaskan. Meski demikian ada syarat yang harus dipenuhi, seperti melakukan pendaftaran secara online atau offline, usia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Setelah melakukan pendaftaran, maka peserta juga harus mengikuti seleksi yang dilakukan secara online juga. Jika lolos seleksi, maka peserta tersebut dapat mengikuti pelatihan, dan nantinya mendapat insentif dari Kartu Pra Kerja Tersebut. (hda/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005